DAFTAR PUSTAKA

Adinda, P., Perwirani, R., & Licia, R. (2026). Analisis faktor penyebab pending klaim BPJS rawat inap di RSUD Bung Karno Kota Surakarta. https://journal.ymci.my.id/index.php/ijhri/article/view/205?utm

Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. (2024). Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/4526/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Indikator Mutu di Rumah Sakit. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. https://jdih.kemkes.go.id/common/dokumen/2024kepdirjenyankes45263.pdf

Dwi Maharani, Aryani, Rahmawati, dan Haryanto (2025) — membahas pending klaim rawat inap dengan fokus pada perubahan kode diagnosis primer dan sekunder serta perbedaan persepsi koder rumah sakit dan verifikator BPJS.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan. https://jdih.kemkes.go.id/documents/peraturan-menteri-kesehatan-nomor-26-tahun-2021

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. https://jdih.kemkes.go.id/documents/peraturan-menteri-kesehatan-nomor-24-tahun-2022

Maulida, E. S., & Djunawan, A. (2022). Analisis penyebab pending claim berkas BPJS Kesehatan pelayanan rawat inap Rumah Sakit Universitas Airlangga. Media Kesehatan Masyarakat Indonesia, 21(6), 374–379. https://doi.org/10.14710/mkmi.21.6.374-379

Nugroho, P. A., Widodo, P. P., & Sunindya, B. R. (2024). Faktor-faktor yang menyebabkan klaim pending rawat inap BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Reksa Waluya. Indonesian Journal of Health Insurance and Medical Records, 1(2), 54–60. https://doi.org/10.31290/ijhimr.v1i2.4979

Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018, khususnya ketentuan persyaratan klaim di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Peraturan ini membahas kelengkapan administrasi dan bukti pendukung pelayanan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman INA-CBG dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan. Peraturan ini menjadi dasar mengenai sistem pembayaran klaim menggunakan INA-CBG.

Putri, A. F., & Novratilova, S. (2025). Analisis faktor penyebab pending klaim BPJS rawat inap di Rumah Sakit Mardi Waluyo Lampung. Jurnal Kesehatan Tropis Indonesia, 3(4), 244–270. https://doi.org/10.63265/jkti.v3i3.127

Putri, C. I., Yektiningtyastuti, Y., Hakim, A. O., & Gunawan, G. (2025). Analisis faktor, penghambat pengajuan klaim BPJS rawat inap di RSUD Majenang tahun 2023. Health Information: Jurnal Penelitian, 17(1), 103–118. https://doi.org/10.36990/hijp.v17i1.1677

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Republik Indonesia. (2024). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Susan (2025) — membahas faktor penyebab pending klaim akibat koding berkas pasien BPJS rawat inap di Rumah Sakit Mata Bali Mandara, termasuk ketidaktepatan koding dan kurangnya bukti dokumentasi pelayanan.

Widaningtyas, Novinawati, dan Asmorowati (2024) — membahas pending klaim rawat inap di RS QIM Batang, termasuk kesalahan kode, reseleksi kode, dan kode ganda.

Artikel penelitian mengenai analisis kelengkapan rekam medis dan kelayakan klaim BPJS pasien rawat inap. (2025). *Jurnal Rekam Medik dan Informasi Kesehatan (J-REMI)*.

Centers for Disease Control and Prevention. (2024). *ICD-10-CM Official Guidelines for Coding and Reporting*.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4801/2021 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Gagal Jantung*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

World Health Organization. (2019). *International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10th Revision (ICD-10), Volume 1: Tabular List*. Geneva: World Health Organization.